

DUA SISI MATA UANG YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PERJALANAN MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Chrisna Satya Wardhana

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

Email: cswardhana75@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi "Dua Sisi Mata Uang Yang Harus Diperhatikan Dalam Perjalanan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang seimbang, diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial secara simultan. Konsep ekonomi hijau, ekonomi sirkular, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk mewujudkan keseimbangan tersebut. Selain itu, partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat lokal sangat diperlukan dalam proses ini.

Kata Kunci: ekonomi hijau; ekonomi sirkular; keadilan sosial; mitigasi perubahan iklim; pembangunan berkelanjutan

Abstract

This research aims to explore "Two Sides of the Coin That Must Be Considered on the Journey to Sustainable Development" using a qualitative approach through literature study. The research method used for analysis is content from various written sources such as scientific journals, international organization reports, and other related documents. The research results reveal that to achieve balanced sustainable development, a balance is needed between economic growth, environmental protection and social justice simultaneously. The concept of a green economy, circular economy, as well as mitigation and adaptation efforts to climate change are promising approaches to realizing this balance. In addition, active participation from the government, private sector, civil society and local communities is very necessary in this process.

Keywords: green economy; circular economy; social justice; climate change mitigation; sustainable development

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi salah satu isu sentral dalam diskursus global pada beberapa dekade terakhir. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap keprihatinan yang meningkat atas dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terus berkembang di berbagai belahan dunia. Konsep pembangunan berkelanjutan berusaha untuk menyeimbangkan tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial (Kusuma, 2021). Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun telah banyak upaya yang

dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, tantangan-tantangan besar masih tetap ada dan perlu diatasi dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

Salah satu tantangan utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai kunci untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, di sisi lain, aktivitas ekonomi yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi gas rumah kaca (Nabila, 2023). Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah menjamin keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan yang terus meningkat, baik di dalam negara maupun antarnegara. Kesenjangan antara kaya dan miskin, akses yang tidak setara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta diskriminasi berbasis gender, ras, atau etnis masih merupakan masalah yang harus diatasi.

Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, terdapat dua sisi mata uang yang harus diperhatikan secara seimbang dan komprehensif. Sisi pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi yang ramah lingkungan (Septiani, 2023). Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan atau keadilan sosial. Oleh karena itu, sisi kedua yang harus diperhatikan adalah perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga kualitas lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu, keadilan sosial juga harus menjadi prioritas, dengan menjamin akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi semua kelompok masyarakat, terlepas dari latar belakang mereka.

Untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif. Salah satu konsep teoretis yang sering digunakan dalam konteks ini adalah konsep ekonomi hijau (*green economy*). Ekonomi hijau mengacu pada sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan. Konsep ini menekankan pentingnya investasi dalam teknologi ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan transisi menuju sumber energi terbarukan. Selain itu, ekonomi hijau juga mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja hijau (*green jobs*) (Auliya & Nurhadi, 2023). Dengan demikian, ekonomi hijau menawarkan jalan untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan secara holistik, dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, diperlukan juga pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara manusia dan lingkungan. Konsep ekonomi lingkungan (*environmental economics*) dan ekonomi ekologi (*ecological economics*) memberikan kerangka teoretis yang berguna dalam menganalisis interaksi antara aktivitas ekonomi dan lingkungan. Ekonomi lingkungan berfokus pada bagaimana sumber daya alam dan lingkungan dapat dikelola secara efisien untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia. Sementara itu, ekonomi ekologi memperluas perspektif ini dengan mempertimbangkan keterbatasan dan kapasitas daya dukung dari ekosistem alam (Auliya & Nurhadi, 2023). Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertahankan integritas

ekosistem dan meminimalkan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dengan memadukan perspektif dari kedua bidang ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang kompleks antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Tantangan besar dalam menyeimbangkan dua sisi mata uang yang saling bertentangan namun saling terkait, yaitu pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan perlindungan lingkungan serta keadilan sosial di sisi lain. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan, namun seringkali dilakukan dengan mengorbankan lingkungan dan sumber daya alam yang terbatas. Aktivitas ekonomi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata juga dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, baik di dalam negara maupun antarnegara. Di sisi lain, upaya untuk melindungi lingkungan dan menjamin keadilan sosial seringkali dipandang sebagai hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara atau perusahaan. Terdapat kekhawatiran bahwa regulasi lingkungan yang ketat dan kebijakan redistribusi pendapatan dapat mengurangi insentif investasi dan menyebabkan perusahaan mencari lokasi yang lebih menguntungkan secara (Mies & Gold, 2021).

Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan telah diterima secara luas sebagai model pembangunan yang ideal (*das sollen*), terdapat kesenjangan yang besar antara aspirasi ini dan realita yang terjadi di lapangan (*das sein*). Banyak negara masih berjuang untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Menurut laporan *Global Sustainable Development Report 2023*, hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2022 (A. T. Firdaus & Anggara, 2023). Sebagian besar negara masih bergantung pada model pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara memadai. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya emisi gas rumah kaca global, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang memburuk. Kesenjangan ini semakin diperburuk oleh krisis global seperti pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik, yang menyebabkan banyak negara mengalami kemunduran dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, penelitian-penelitian terbaru telah mengeksplorasi berbagai pendekatan inovatif untuk mengatasi tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Salah satu area penelitian yang menjanjikan adalah pengembangan model ekonomi sirkular (*circular economy*), yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi sumber daya dan meminimalkan limbah serta emisi dengan mengadopsi prinsip-prinsip seperti desain produk yang mudah digunakan kembali, perbaikan, dan daur ulang (Aziz, 2020). Beberapa studi telah menunjukkan bahwa penerapan model ekonomi sirkular dapat memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, seperti penciptaan lapangan kerja baru, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan keamanan sumber daya.

Selain itu, penelitian-penelitian terbaru juga berfokus pada peran teknologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Misalnya, penggunaan teknologi pintar (*smart technologies*) seperti *Internet of Things (IoT)* dapat membantu meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam (Aisyah & Pratama, 2023). Teknologi *blockchain* juga dieksplorasi sebagai alat untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasokan global, memfasilitasi perdagangan produk yang diproduksi secara berkelanjutan, dan mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab (Chakim, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi "Dua Sisi Mata Uang Yang Harus Diperhatikan Dalam Perjalanan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literature.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) untuk mengeksplorasi secara mendalam "Dua Sisi Mata Uang Yang Harus Diperhatikan Dalam Perjalanan Menuju Pembangunan Berkelanjutan". Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, laporan dari organisasi internasional, dan dokumen-dokumen terkait lainnya (Firmansyah, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pencarian sistematis melalui basis data akademik seperti Google Scholar, serta sumber-sumber online lainnya yang relevan. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "sustainable development", "economic growth", "environmental protection", "social equity", "green economy", dan kombinasi dari kata kunci tersebut. Setelah mengumpulkan sumber-sumber literatur yang relevan, analisis isi (content analysis) akan dilakukan untuk mengidentifikasi pendekatan utama, rekomendasi kebijakan, praktik terbaik, serta peluang dan tantangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang seimbang (Paré & Kitsiou, 2017). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tematik (thematic analysis) untuk mengekstraksi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari berbagai sumber literatur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang status terkini dari upaya-upaya global dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial, serta merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Dua Sisi Mata Uang Yang Harus Diperhatikan Dalam Perjalanan Menuju Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah metafora yang menekankan perlunya menyeimbangkan dua aspek utama dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Metafora ini mengibaratkan pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah mata uang yang memiliki dua sisi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sisi pertama dari mata uang tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, yang merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, pertumbuhan ekonomi seringkali dilakukan dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan mengabaikan dampak lingkungan, seperti deforestasi, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, sisi kedua dari mata uang yang harus diperhatikan adalah perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Aspek ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta menjamin akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Kedua sisi ini saling terkait dan harus diseimbangkan, karena pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan akan mengancam kelestarian lingkungan dan keadilan sosial, sementara perlindungan lingkungan dan keadilan sosial yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Berdasarkan analisis literatur, salah satu pendekatan utama yang diidentifikasi dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial adalah konsep ekonomi hijau (green economy). Ekonomi hijau mengacu pada sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan (Ahmad et al., 2023). Konsep ini menekankan pentingnya investasi dalam teknologi ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan transisi menuju sumber energi terbarukan. Selain itu, ekonomi hijau juga mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs). Dengan demikian, ekonomi hijau menawarkan jalan untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan secara holistik, dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

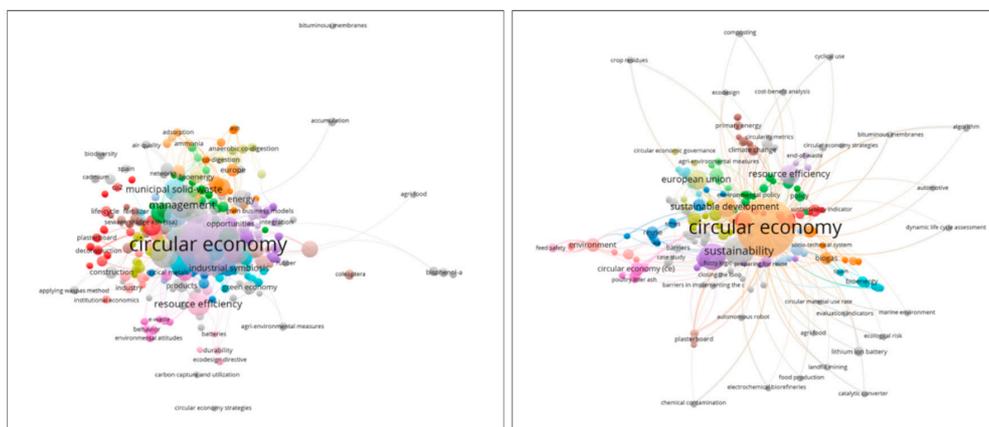


Gambar 1. Manfaat Ekonomi Hijau

Sumber: Bappenas (2021)

Gambar 1 menunjukkan berbagai manfaat yang akan diperoleh jika ekonomi hijau (green economy) tercapai. Ekonomi hijau berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Dari perspektif ekonomi, ekonomi hijau diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan GDP sebesar 6,1%-6,5% per tahun sampai 2045 dan menciptakan 25-34% lapangan kerja hijau (green jobs) baru pada tahun yang sama. Selain itu, terdapat proyeksi terbentuknya 1,8 juta lapangan kerja hijau pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan. Dari sisi lingkungan, ekonomi hijau diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 87-96 miliar ton CO₂ selama periode 2021-2050, mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta mengurangi risiko polusi udara dengan melestarikan 40.000 hektar mangrove pada tahun 2045.

Pendekatan lain yang muncul dari analisis literatur adalah pengembangan model ekonomi sirkular (circular economy). Ekonomi sirkular bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi sumber daya dan meminimalkan limbah serta emisi dengan mengadopsi prinsip-prinsip seperti desain produk yang mudah digunakan kembali, perbaikan, dan daur ulang⁸. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa penerapan model ekonomi sirkular dapat memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, seperti penciptaan lapangan kerja baru, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan keamanan sumber daya (Kurnia et al., 2023).



Gambar 2. Bilbiometric co-occurrent network visualization

Gambar 2 merupakan visualisasi kata kunci atau konsep-konsep utama yang terkait dengan ekonomi sirkular (circular economy) yang diperoleh dari analisis literatur atau studi-studi terkait. Visualisasi ini memberikan gambaran mengenai aspek-aspek penting yang menjadi fokus dalam penelitian dan pembahasan tentang ekonomi sirkular. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa kata kunci atau konsep yang paling sering muncul dan memiliki hubungan erat dengan ekonomi sirkular adalah sustainability (keberlanjutan), recycling (daur ulang), China, management (manajemen), efficiency (efisiensi), dan waste (limbah). Konsep-konsep ini mencerminkan bahwa dalam penerapan ekonomi sirkular, aspek-aspek seperti daur ulang, pengelolaan yang efisien, dan minimalisasi limbah merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan keberlanjutan.

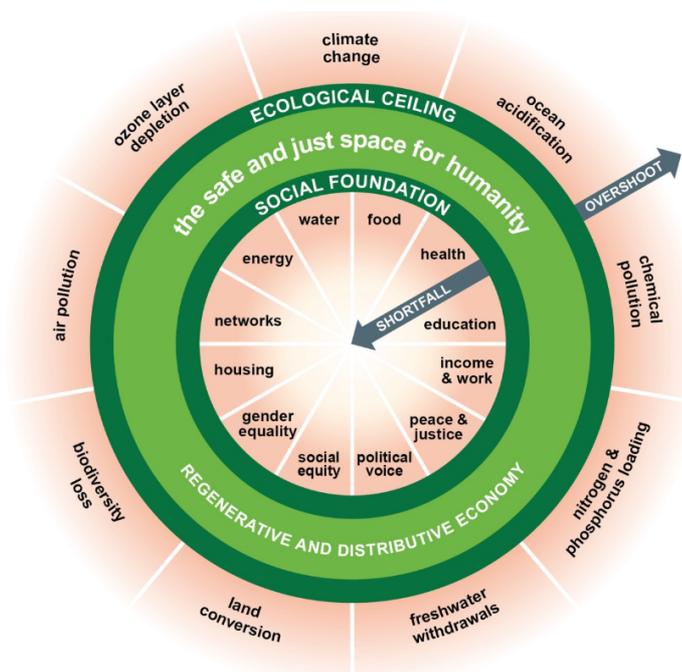
Selain itu, gambar 2 juga menunjukkan bahwa studi-studi dengan kata kunci seperti waste management (pengelolaan limbah), resource efficiency (efisiensi sumber daya), recycling (daur ulang), dan China memiliki rata-rata sitasi yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek-aspek tersebut menjadi pusat perhatian dalam penelitian dan memiliki signifikansi yang tinggi dalam konteks ekonomi sirkular. Gambar 2 memberikan perspektif bahwa ekonomi sirkular tidak hanya terbatas pada konsep daur ulang dan minimalisasi limbah, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti pengelolaan sumber daya yang efisien, ekologi industri, dan keberlanjutan secara keseluruhan. Visualisasi ini membantu memahami fokus utama dan keterkaitan antara konsep-konsep penting dalam ekonomi sirkular berdasarkan kajian literatur yang ada.

Untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan dalam pembangunan berkelanjutan, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan terpadu. Pertama, pemerintah harus memperkuat kerangka regulasi dan insentif yang mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung transisi menuju ekonomi sirkular. Regulasi yang ketat mengenai emisi karbon, pengelolaan limbah, dan efisiensi sumber daya harus dilengkapi dengan insentif fiskal seperti kredit pajak atau subsidi untuk investasi hijau. Pemerintah juga harus meningkatkan investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, seperti energi terbarukan, transportasi publik, dan pengelolaan air yang efisien. Selain itu, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup berkelanjutan sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku yang diperlukan (S. Firdaus, 2022).

Sektor swasta juga memiliki peran krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perusahaan harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke

dalam operasi dan strategi bisnisnya, dengan mengadopsi praktik terbaik seperti efisiensi energi, pengurangan limbah, dan pengelolaan rantai pasokan yang bertanggung jawab. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi hijau juga sangat penting untuk mendorong inovasi yang dapat membantu mengatasi tantangan lingkungan. Selain itu, sektor swasta harus berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal, juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendorong praktik pembangunan berkelanjutan, serta menyuarakan keprihatinan dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak (Rahman et al., 2023).

Praktik terbaik (best practices) dari berbagai negara atau organisasi dalam mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan yang seimbang seperti di Islandia. Islandia telah berhasil menerapkan strategi energi berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya geotermalnya untuk menghasilkan listrik dan pemanas ruangan. Hampir 85% energi listrik di Islandia berasal dari sumber terbarukan, terutama energi panas bumi dan tenaga air (Mikhaylov, 2020). Selain itu, di Malaysia juga telah mengembangkan konsep "Ekonomi Doughnut" yang menekankan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menghormati batas-batas ekologis planet. Konsep ini telah diadopsi oleh beberapa kota dan organisasi di seluruh dunia (Zainol & Au-Yong, 2016).



Gambar 3. Visual dari konsel ekonomi Doughnut

Gambar 3 merupakan representasi visual dari konsep "Ekonomi Doughnut" yang dikembangkan oleh ekonom Inggris Kate Raworth. Konsep ini menawarkan kerangka kerja alternatif untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Bagian tengah atau "lubang" doughnut mewakili "social foundation" atau fondasi sosial yang terdiri dari kebutuhan dasar manusia seperti air, makanan, energi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, kesetaraan gender, dan perdamaian. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap individu dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak. Di luar lubang

tersebut, terdapat cincin hijau yang mewakili "ecological ceiling" atau batas-batas ekologis planet seperti perubahan iklim, polusi udara, kehilangan keanekaragaman hayati, dan konversi lahan yang berlebihan. Ruang di antara fondasi sosial dan batas ekologis ini disebut sebagai "safe and just space for humanity", yaitu ruang di mana kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi tanpa melampaui batas-batas ekologis planet. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang seimbang, ekonomi harus beroperasi dalam ruang aman dan adil ini, dengan memastikan pemenuhan kebutuhan sosial tanpa merusak lingkungan alam (Dahlan, 2022).

Aspek perlindungan lingkungan dan keadilan sosial merupakan sisi lain dari "mata uang" yang harus diperhatikan dalam perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan. Perlindungan lingkungan menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), aktivitas manusia telah menyebabkan pemanasan global sekitar 1,1°C sejak era pra-industri, dan jika tidak ada tindakan signifikan, kenaikan suhu global dapat mencapai 1,5°C pada tahun 2030-an (Dahlan, 2022). Hal ini dapat mengakibatkan dampak yang parah, seperti kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan kepunahan spesies.

Oleh karena itu, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi sangat penting. Mitigasi dapat dilakukan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui transisi energi terbarukan, efisiensi energi, dan praktik pertanian berkelanjutan. Adaptasi melibatkan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, seperti dengan meningkatkan infrastruktur tahan bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, dan mempromosikan praktik pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim (UNDP, 2019). Selain itu, perlindungan keanekaragaman hayati juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan manusia.



Gambar 4. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Sumber: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/5360/peningkatan-efektivitas-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/0/infografis>

Gambar 4 secara visual mengilustrasikan beberapa upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang telah Anda sebutkan sebelumnya. Kita dapat melihat berbagai elemen penting yang terkait dengan hal ini. Pada bagian atas, terdapat informasi

tentang penurunan konsumsi bahan perusak ozon sebesar 30% pada tahun 2013 dibandingkan tahun 1989 menurut potensi penipisan ozon (ODP). Hal ini merupakan upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang merusak lapisan ozon dan berkontribusi pada perubahan iklim. Selanjutnya, gambar menunjukkan sekitar 2.000 desa/kelurahan yang menerapkan konsep Program Kampung Iklim (Proklim) pada tahun 2015, dengan sekitar 100 desa telah bergabung. Program ini mendorong pengembangan inisiatif dan kerja sama masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti yang dapat kita lihat dari ilustrasi pemukiman dengan praktik pertanian berkelanjutan, penghijauan, dan kegiatan ramah lingkungan lainnya. Gambar 4 juga menunjukkan pengembangan insentif dan kerjasama dalam penanganan perubahan iklim, yang disimbolkan dengan tangan bersama-sama memegang pohon. Ini dapat mencerminkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terpadu.

Keadilan sosial menekankan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Menurut laporan World Social Report 2020 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan risiko konflik (Maulidyna, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengatasi kesenjangan ini dengan mempromosikan kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender, memberikan akses pendidikan yang berkualitas, menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau, dan menciptakan peluang kerja yang layak bagi semua.



Gambar 5. Upaya Koreksi sistem bernegara menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Gambar ini menunjukkan aktivitas masyarakat yang mendukung upaya mencapai keadilan sosial sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan. Terlihat sekelompok warga berkumpul di suatu ruangan dengan nuansa budaya Indonesia yang kental. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan masyarakat yang disebut La Nyalla untuk mendukung koreksi sistem bernegara menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi agar pemerintah segera melakukan koreksi atas sistem yang ada agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan dan

kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Upaya ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, dan kesejahteraan bagi semua kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat seperti ini penting untuk memastikan agar pembangunan dapat berlangsung inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta kepentingan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan.

Untuk mencapai keadilan sosial yang sebenarnya, berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi harus diatasi, termasuk diskriminasi berbasis ras, etnis, agama, kasta, disabilitas, atau status sosial-ekonomi lainnya. Partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya kelompok yang rentan dan terpinggirkan, juga sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan (Padilah et al., 2023). Dengan menggabungkan upaya perlindungan lingkungan dan keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya dapat dicapai, di mana kesejahteraan manusia dan kelestarian alam saling mendukung satu sama lain.

Kesimpulan

Pembangunan berkelanjutan yang seimbang memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Tantangan utama adalah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial secara simultan. Konsep ekonomi hijau dan ekonomi sirkular merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk mencapai keseimbangan tersebut, dengan mendorong transisi menuju pola produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan, investasi dalam teknologi hijau, serta menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. Selain itu, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta perlindungan keanekaragaman hayati, juga sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di sisi lain, keadilan sosial harus diprioritaskan dengan menjamin akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat lokal sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang seimbang dan inklusif.

BIBLIOGRAFI

- Ahmad, A., Hartanto, S., Harkat, A., Kurniawan, A., & Mimi, H. A. (2023). Merapah Akuntansi Hijau Dalam Harmoni Pemikiran Perintis (Ala “Prilly Latuconsina”) Dan Industri Pusaka Lingkungan Jember Menuju Green City. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (Jpak)*, 11(3), 299–309.
- Aisyah, A., & Pratama, I. N. (2023). Kebijakan Strategis Dalam Merancang Dan Membangun Konsep Smart City Yang Berkelanjutan. *Journal Of Environmental Policy And Technology*, 1(2), 79–89.
- Auliya, F. N., & Nurhadi, N. (2023). Towards A Sustainable Green Economy: Challenges And Opportunities For Long-Term Environmental And Economic Stability. *Pengabmas Nusantara*, 5(2), 97–102.
- Aziz, A. (2020). Perdagangan Dan Kerjasama Ekonomi Dalam Ekonomi Sirkular. *Ekonomi Sirkular Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 147.
- Chakim, M. H. R. (2023). Kemajuan Teknologi Di Abad 21: Perubahan Perspektif. *Adi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 40–45.

- Dahlan, R. (2022). *Ekonomi Sirkular Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jejak Pustaka.
- Firdaus, A. T., & Anggara, A. S. (2023). Perspektif Intelijen: Analisis Menghadapi Tantangan Mewujudkan Sdgs Pada Sektor Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1), 1.
- Firdaus, S. (2022). Al-Qur'an Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Untuk Pencapaian Sdgs. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 120–138.
- Firmansyah, D. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (Jiph)*, 1(2), 85–114.
- Kurnia, S., Alamsyahbana, M. I., Chartady, R., Arifin, S. V., & Sesaria, M. I. (2023). Circular Solutions For Decent Work And Economic Growth: Lessons From Sustainable Development Goals (Sdg) 8. *Academia Open*, 8(1), 10–21070.
- Kusuma, D. (2021). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Penanaman Investasi Di Indonesia. *Researchgate. Net, May*.
- Maulidyna, S. A. (2022). Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 29(2), 265–292.
- Mies, A., & Gold, S. (2021). Mapping The Social Dimension Of The Circular Economy. *Journal Of Cleaner Production*, 321, 128960.
- Mikhailov, A. (2020). Geothermal Energy Development In Iceland. *International Journal Of Energy Economics And Policy*, 10(4), 31–35.
- Nabila, T. (2023). *Analisis Hubungan Kausalitas Jumlah Transportasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Degradasi Lingkungan Di Indonesia*. Fakultas Ekonomi.
- Padilah, A. H., Fayuni, D. F., & Nurviyanti, M. D. (2023). Partisipasi Politik Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi. *Journal Of Social And Policy Issues*, 192–201.
- Paré, G., & Kitsiou, S. (2017). Methods For Literature Reviews. In *Handbook Of Ehealth Evaluation: An Evidence-Based Approach [Internet]*. University Of Victoria.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 7(2), 1461–1471.
- Septiani, F. D. (2023). Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan Apbn: Tantangan Dan Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (Pph) Dan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). *Jmbi Unsrat (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2180–2192.
- Zainol, R., & Au-Yong, C. P. (2016). What Brings Youth To Recreational Parks? *Planning Malaysia*, 14.

Copyright holder:

Chrisna Satya Wardhana (2024)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

